

SUBYEK	:	PERKAWINAN
TAHUN	:	2023
SUMBER PERATURAN	:	PERWAL KOTA KEDIRI NO.23, LD 2023/NO 23, 11 HLM.
JUDUL PERATURAN	:	PEDOMAN PELAKSANAAN IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI
Abstrak	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aparatur Sipil Negara merupakan Pegawai Instansi Pemerintah dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan termasuk dalam menyelenggarakan kehidupan berkeluarga. Untuk lebih meningkatkan dan menegakkan disiplin Aparatur Sipil Negara serta memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan perkawinan dan perceraian pegawai perlu adanya pedoman pelaksanaan Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Aparatur Sipil Negara; berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Izin Perkawinan dan Perceraian Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri ▪ Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945; UU NO 16 Tahun 1950 Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU NO 13 Tahun 1954; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Uu No 1 Tahun 2022; PP No 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan PP No 45 Tahun 1990; PP No 94 Tahun 2021. ▪ Dalam Peraturan Walikota Ini diatur tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian; Pejabat Pemberi Izin; Perkawinan; Perceraian; Pegawai ASN Berkedudukan sebagai Penggugat; Pegawai ASN Berkedudukan Sebagai Tergugat; Pelaporan; Pembagian Gaji; Hidup Bersama Di Luar Ikatan Perkawinan Yang Sah; Ketentuan Lain-Lain
Catatan	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Izin perkawinan dan perceraian Pegawai ASN yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini dinyatakan tetap berlaku. ▪ Permohonan Izin perkawinan dan perceraian Pegawai ASN yang telah diajukan namun masih dalam proses pemberian pertimbangan penerbitan izin wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini. ▪ Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka ketentuan pendelegasian Walikota kepada pejabat untuk pemberian izin perkawinan dan perceraian Pegawai ASN dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ▪ Peraturan Walikota Ini Mulai Berlaku Pada Tanggal Diundangkan, Yaitu Tanggal 19 Juni 2023. ▪ Lamp: 17 Hlm.